

# Kerentanan Dan Ragam Ancaman Keamanan Di Provinsi Lampung

## ABSTRACT

This research explains the various vulnerabilities and security threats faced by Lampung Province. This study is based on the fact that there has been an increase in types of threats at the global level from year to year, at least in the last three years. At the nation-state level, Indonesia is also aware of the increasingly complex variety of threats. This can be seen from the explanation in the Indonesian Defense White Papers which had been published in 2003, 2008, and 2015. One of the critical subnational entities to study is Lampung. The analytical frameworks used are the concepts of city security and vulnerability. Data were collected through a literature review with data sources from a number of official online pages, namely BPS Lampung Province, UNDP, WALHI, and others. This project reveals that there were threats and vulnerabilities carried by Lampung Province, including environmental, economic, political and social security.

*Keywords: Threat, security, Lampung*

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan berbagai kerentanan dan ancaman keamanan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Kajian ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat peningkatan jenis ancaman di tingkat global dari tahun ke tahun, setidaknya tiga tahun terakhir. Pada tingkat negara-bangsa, Indonesia juga menyadari ragam ancaman yang semakin kompleks. Hal ini dapat terlihat dari penjelasan di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2003, 2008, dan 2015. Salah satu entitas subnasional yang kritical untuk ditelaah ialah Lampung. Kerangka analitis yang digunakan ialah konsep keamanan dan kerentanna kota. Data dihimpun melalui kajian literatur dengan sumber data dari sejumlah laman daring yang resmi, yakni BPS Provinsi Lampung, UNDP, WALHI, dan lainnya. Proyek ini mengungkapkan bahwa terdapat ancaman dan kerentangan yang dipikul oleh Provinsi Lampung, mencakup kewanaman lingkungan, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.

Keyword: Ancaman, Keamanan, Lampung

---

<sup>1</sup> Gita Karisma, Iwan Sulisty, dan Indra Jaya Wiranata adalah dosen jurusan hubungan internasional FISIP, Universitas Lampung. Email: [gita.karisma@fisip.unila.ac.id](mailto:gita.karisma@fisip.unila.ac.id)

## PENDAHULUAN

Riset ini mengkaji berbagai ancaman dan kerentanan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Latar belakang mengungkapkan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Alasan tersebut utamanya disandarkan pada alasan akademis-institusional serta kecenderungan ancaman global hingga kecenderungan ancaman pada tingkat subnasional.

Dari aspek akademis-institusional, kajian yang berkaitan dengan ancaman dan kerentanan di Lampung ini krusial dilakukan adalah karena Jurusan Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) berkedudukan di Provinsi Lampung atau lebih khusus di kota Bandarlampung. Di dalam Jurusan HI FISIP Unila terdapat satu kelompok kajian yang memang memfokuskan perhatian pada aspek keamanan. Oleh karena itu, Jurusan HI FISIP Unila, yang mempunyai ciri khas peminatan pada studi paradiplomasi (*paradiplomacy*), tentu memiliki peran dalam memberikan kontribusi berupa hasil riset yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan oleh pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Sokongan dalam bentuk pemikiran atau hasil kajian ancaman dan kerentanan kota ini kemungkinan besar dapat memperkuat beragam perencanaan, langkah, ataupun tindakan secara lintas-sektoral, sehingga dimensi keamanan insani dari semua warga Provinsi Lampung dapat terjamin.

Dari segi kecenderungan pada tingkat dunia, CrowdStrike (2022: 11-12) lewat laporan tahunannya yang berjudul *2022 Global Threat Report* mengungkapkan bahwa, karena aktivitas interaksi melibatkan teknologi komunikasi dan informasi, maka dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat peningkatan sebanyak 82% serangan (masing-masing 1.474 dan 2.686 kasus) yang berhubungan dengan kebocoran data. Kebocoran data itu terjadi di hampir semua sektor, mencakup industri dan teknik, manufaktur, teknologi, pelayanan profesional, layanan keuangan, kesehatan, barang konsumsi, hukum, akademis, serta logistik. CrowdStrike (2022: 17) juga mencatat, pada tahun 2021, aktor-aktor yang melakukan serangan terhadap data yang dimaksud berkaitan erat dengan eksistensi Tiongkok dimana mereka memanfaatkan faktor kerentanan; dan oleh

karena itu, dibutuhkan perlindungan terhadap sistem dan melakukan pengawasan terhadap pelaku kriminal secara bawah tanah.

Namun demikian, laporan setiap tahun tentang ancaman global yang diterbitkan oleh CrowdStrike yang dikemukakan di atas tidak menganalisis per kawasan atau per negara. Peneliti memandang perlu untuk mengedepankan kenyataan itu dengan tujuan agar diperoleh gambaran universal dalam konteks ancaman. Oleh karena itu, tentu penting untuk melihat sekilas bagaimana ancaman yang dipersepsikan oleh Indonesia sebagai suatu negara.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, Indonesia menyadari bahwa ancaman di masa mendatang akan bersifat tidak pasti, sulit untuk diprediksi/dikalkulasi, kian rumit, dan multidimensi; mulai dari ancaman/serangan militer (yakni perang) hingga non militer yang terdiri dari konflik internal, terorisme, spionase, kejahatan transnasional, dampak dari teknologi, perubahan iklim, bencana alam, energi dan pangan (air dan makanan), penyakit, serangan siber, perdagangan obat-obatan ilegal, termasuk ancaman yang berwujud hybrid, dimana semua ancaman ini juga akan menciptakan kerentanan keamanan bagi Indonesia (Lihat Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, 2015, khususnya Bab 2).

Dalam konteks kerentanan global, kata 'Indonesia' disebut di dalam suatu laporan berjudul *Global Risk and Vulnerability Index* dengan mengaitkannya dengan bencana alam, yaitu tanah longsor sebesar 13,88 per sen (Dao & Peduzzi, 2003). Adapun berbagai dokumen lainnya bila ditelusuri menggunakan kata kunci 'Indonesia' dan '*vulnerability*'; maka, secara umum, hal itu dikorelasikan dengan aspek lingkungan, khususnya risiko perubahan iklim (Lihat misalnya ADB, 2021; Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia, 2022; Webb & Usher, 2017).

Oleh karena itu, menjadi cukup beralasan jika penelitian ini menyoroti persoalan kerentanan dan keamanan, lebih spesifik yaitu Provinsi Lampung. Dari waktu ke waktu, baik pada tingkat global maupun nasional dan bahkan hingga subnasional, persoalan ancaman dan kerentanan menjadi semakin penting untuk dikaji. Hal itu adalah karena kian pesatnya perubahan yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa global. Indonesia juga tidak lepas dari risiko ancaman dan kerentanan, termasuk pula

entitas subnasional, yaitu provinsi. Dalam studi ini, Provinsi Lampung dijadikan studi kasus mengingat provinsi ini, secara realitas geografis, terancam dan rentan dengan pelbagai risiko, baik *societal* maupun keamanan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan sumber data dari berbagai website resmi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *United Nations Development Programme* (UNDP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ancaman Keamanan**

Konsep Keamanan terus mengalami perkembangan, salah satu konsep yang lahir pasca Perang Dingin adalah keamanan non tradisional. Keamanan individu menurut Buzan (Buzan, 1983) sulit didefinisikan karena tiap individu bisa menghadapi masalah keamanan yang berbeda, misalnya mungkin satu individu bebas dari masalah kemiskinan dan kaya namun ia tetap tidak bisa menghindar dari masalah bencana alam dan nuklir, belum lagi masalah keamanan seperti pengangguran dan kemiskinan yang memiliki hubungan sebab-akibat yang rumit. Namun jika keamanan individu ini dikaitkan dengan negara yang semakin sulit dibedakan maka ia disebut ketidakamanan bersama. Hal ini bukan hanya terkait masalah efisiensi, atau kekurangan negara, yang dengannya negara menjalankan fungsi internal (tatanan sosial) dan eksternal (pertahanan kelompok), tetapi juga soal negara itu sendiri yang menjadi sumber kontroversi dan ancaman (Buzan, 1983).

Menurut Buzan (Buzan, 1983), ada empat sumber ancaman yang dapat muncul dari negara. Pertama, ancaman yang timbul dari pembuatan dan

penegakan hukum domestik; kedua, ancaman yang timbul dari tindakan politik langsung oleh negara terhadap individu atau kelompok; ketiga, ancaman yang timbul dari perebutan kendali atas mesin negara; dan keempat, ancaman yang timbul dari kebijakan keamanan eksternal negara. Perspektif ancaman yang muncul dari negara ini akan membantu penelitian ini menganalisis sumber ancaman yang dapat datang dari pemerintah subnasional dan kepolisian daerah Provinsi Lampung.

Terdapat pula perbedaan cara pandang antara keamanan tradisional dan non tradisional dalam melihat hubungan antara keamanan militer dengan nonmiliter. Pakar keamanan tradisional, misalnya akan setuju bahwa HIV/AIDS menjadi masalah mengkhawatirkan di bagian Afrika yang membebani hubungan sosial dan ekonomi di banyak negara yang terkena dampaknya. Namun, mereka tidak setuju bahwa ini merupakan masalah keamanan, kecuali keamanan militer dipertaruhkan secara langsung (Elbe, 2003). Pendekatan yang lebih luas mungkin berpendapat sebaliknya bahwa HIV/AIDS merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat, bahwa aktor global dan regional telah berhasil mengamankan HIV/AIDS sepenuhnya, atau bahwa masalah keamanan perempuan dan anak-anak harus diberikan perhatian khusus (Buzan & Hansen, 2009).

Beberapa jenis ancaman menurut Barry Buzan (Buzan, 2016), meliputi ancaman militer, politik, ekonomi, social, dan lingkungan. Berikut di bawah ini adalah tabel contoh jenis ancaman menurut Barry Buzan.

Tabel 2.1. Ancaman dan Tipe Negara

Militer	Politik	Sosial	Ekonomi	Lingkungan
Pelecehan terhadap kapal nelayan, melalui penggerebekan hukuman, penyitaan teritorial dan invasi penuh, hingga penyerangan terhadap keberadaan penduduk dengan blokade atau pengeboman	Penggulingan pemerintah, mengobarkan pemisahan diri, dan mengganggu struktur politik negara untuk melemahkannya sebelum serangan militer	Terkait berbagai isu penyeragaman adat istiadat, agama, etnis, dan nilai pada suatu negara. Proses negara-bangsa seringkali ditujukan untuk menekan, atau setidaknya menyeragamkan, identitas sosial sub-negara, seperti banyak contoh. Orang Bulgaria menekan identitas Turki sama seperti orang Turki menekan orang Armenia dan Kurdi. Kebangsaan Baltik takut pada Rusifikasi,	Persaingan sengit dari impor asing; pembatasan terhadap ekspor sendiri; manipulasi harga, mata uang dan suku bunga; kesulitan mendapatkan kredit; gagal bayar hutang; dan sejumlah tindakan lainnya dapat berdampak serius pada perekonomian nasional.	Bencana alam, banjir, gempa, pemanasan global

Sumber: Buzan (2016).

Ancaman politik ditujukan pada stabilitas organisasi negara. Tujuan mereka dapat berkisar dari menekan pemerintah pada kebijakan tertentu. Ancaman sosial sering berkaitan dengan ancaman politik dan militer. Ancaman social berkaitan dengan budaya, ide dan ideologi. Ancaman militer, politik, sosial, ekonomi dan ekologis ini bukan merupakan agenda status untuk keamanan nasional. Ancaman militer masih unggul dan dipertahankan sebagai kepentingan vital negara. Kekhawatiran tentang keamanan militer secara tradisional menutupi isu-isu mendasar dari ancaman politik dan sosial, namun dalam praktiknya, dan terutama untuk negara paling maju dalam sistem, relevansinya menurun dibandingkan dengan ancaman di sektor lain.

Masalah keamanan nasional dapat dipahami dengan melihat tidak hanya jenis ancaman melainkan juga kerentanan objek yang menjadi sarannya. Konsep ketidakamanan merupakan cerminan dari kombinasi ancaman dan kerentanan yang keduanya tidak dapat dipisahkan secara bermakna (Buzan, 1983, hlm. 73). "It is clear that vulnerability connects intimately with both weak states and weak powers. Weak powers are a well understood phenomenon, and require

little elaboration. Their weakness is relative to the capabilities commanded by other states in the system, particularly the great powers of the day” (Buzan, 1983).

Tabel 2.2. Kerentanan dan Tipe Negara

		Socio-political cohesion	
		Weak	Strong
Power	Weak	Highly vulnerable to most types of threat	Particularly vulnerable to military threats
	Strong	Particularly vulnerable to political threats	Relatively invulnerable to most types of threat

Sumber: (Buzan, 2016)

### **Kerentanan Kota**

Interpretasi yang diterima atas ancaman memiliki potensi untuk berpindah antar lokal, nasional, regional, atau global, dan ini berpotensi menghadapi berbagai macam wacana lokal yang berbeda dalam perjalanannya. Setiap pertemuan ancaman ini kemudian dapat mengubah interpretasi awal dan beradaptasi dengan kekhasan lokal baru (Stritzel, 2014).

Penelitian komparatif tentang kota sering disajikan sebagai strategi terbaik untuk memahami perubahan saat ini dalam struktur sosial dan kebijakan kesejahteraan. Tiga kategori spesifik orang yang diidentifikasi sebagai orang yang sangat terpapar risiko sosial baru: orang muda pengangguran atau pekerjaan tidak tetap; ibu tunggal dengan anak usia prasekolah, dan migran dewasa generasi (Sabatinelli dkk., 2014). Kerentanan sosial memang bukan hanya masalah terbatasnya sumber daya, tetapi juga ketidakpastian dan risiko isolasi sosial: aspek-aspek yang tidak selalu diperhitungkan oleh statistik resmi, dan yang hanya dapat diselidiki oleh penelitian empiris asli.

Kerentanan sosial adalah hasil dari lemahnya integrasi sosial yang memengaruhi orang-orang yang berada dalam posisi tidak aman dalam masyarakat. Kesejahteraan lokal adalah sistem kompleks intervensi sosial publik dan swasta yang aktif di tingkat kota. Krisis menyebabkan memburuknya masalah keuangan dan sosial saat ini yang memengaruhi sebagian besar kota di Eropa,

meningkatkan kerentanan sosial dan menempatkan sistem kesejahteraan lokal di bawah tekanan yang lebih besar (Sabatinelli dkk., 2014).

Ada beberapa variabel yang dapat dibandingkan untuk melihat kerentanan kota yaitu, variabilitas rezim geografis dan kesejahteraan, sistem kesejahteraan lokal, serta konsistensi kesejahteraan lokal dengan nasional. Kesejahteraan lokal dapat berdampak jika ia tidak menggantikan kesejahteraan nasional dalam arti jika keduanya saling terkait (Sabatinelli dkk., 2014).

## **Ancaman Keamanan di Provinsi Lampung**

### **1. Ancaman Keamanan Ekonomi**

Lampung merupakan salah satu penyangga pangan nasional. Beberapa komoditas Lampung adalah beras, daging sapi, sayuran, pisang, nanas, singkong, bahkan kopi, lada dan cengkeh diekspor ke negara luar. Lampung bergantung umumnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan. Berdasarkan Data BPS, Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 27,90 persen (Dinastph, 2023).

Jika melihat dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berbagai target pembangunan di Lampung sebagian berhasil terutama ketika melihat trend perubahan pada fakta kemiskinan, gini, dan indeks pembangunan manusianya. Kondisi ekonomi di Lampung menunjukkan trend peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di Lampung mengalami peningkatan dari target 3,5-4 yaitu 4,28 persen. Selain itu persentase kemiskinan di Provinsi Lampung adalah 11,44 persen dari 9 juta penduduk atau sejumlah 995.590 jiwa (BPS, 2022a), turun dari yang sebelumnya mencapai 1.091.140 atau 12,76 persen pada tahun 2020.

Pada September 2022, indeks gini Lampung tercatat 0,313 (moderat) atau lebih baik dibandingkan dengan indeks gini pada September 2020 yang tercatat 0,320. Ini menunjukkan penurunan kesenjangan di Provinsi Lampung. Selain itu, sejumlah target pembangunan Pemprov Lampung hingga tahun 2022 telah tercapai. Indeks pembangunan manusia yang mencapai 70,45 dan produk

domestik regional bruto per kapita mencapai Rp 45,1 juta telah sesuai target pembangunan Provinsi Lampung.

Tabel 4.1. Perbandingan capaian dan target RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022

<i>Indikator Kerja Makro</i>	<b>Target Pada Perubahan RKPD 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Pertumbuhan ekonomi %</i>	3,5-4	4,28	Capaian 2022
<i>PDRB per kapita (Juta Rupiah)</i>	42-43	45,1	Capaian 2022
<i>Inflasi %</i>	3,0 +- 1	5,51	Capaian 2022
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka %</i>	4,3-4,4	4,52	Capaian Agustus 2022
<i>Tingkat Kemiskinan %</i>	11,9-12,4	11,44	Capain September 2022
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	70-70,3	70,45	Capaian 2022
<i>Indeks Gini</i>	0,308-0,324	0,313	Capaian September 2022
<i>Nilai Tukar Petani</i>	102-103	104,3	Capaian 2022
<i>Pertumbuhan PAD</i>	5	13,63	Data Bapenda 2022
<i>Kemantapan Jalan Provinsi %</i>	76	76,602	Capaian 2022
<i>Emisi Gas Rumah Kaca</i>	6,915	8,88	Hasil perhitungan PEP Bappenas 2022

Sumber: (BPS, 2022a)

Tabel di atas menunjukkan rangkuman target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibanding dengan fakta capaian di tahun 2022. Tabel di atas menunjukkan bahwa Lampung memiliki masalah pada isu inflasi dan pengangguran. Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,5%–5,0% (Bank Indonesia, 2022). Sayangnya, angka inflasi di Lampung belum sesuai dengan angka 3 % yang diharapkan Pemerintah pusat. Inflasi tahunan Provinsi Lampung pada triwulan II 2022 tercatat di atas rentang sasaran Inflasi 3%±1, yaitu sebesar 5,00% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 2,43% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 4,35% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi Sumatera yang tercatat sebesar 5,82% (yoy) (Bank Indonesia, 2022). Masalah inflasi Lampung di tahun 2022 ini disebabkan berbagai hal seperti masalah supply dan kenaikan harga pupuk, gandum, kedelai, dan jagung dunia akibat berlanjutnya kenaikan harga

komoditas global. Masalah inflasi juga bersumber dari kelompok *Volatile Food* pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional. Selain itu, tekanan inflasi dari kelompok *Administered Prices* diperkirakan meningkat karena dorongan kenaikan tarif cukai rokok, peningkatan harga BBM dan bahan bakar rumah tangga seiring dengan kenaikan harga energi dunia

Disamping masalah inflasi, hal lain yang masih menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran terbuka di Lampung yang masih mencapai 4,52 persen pada tahun 2022 (BPS, 2022a). Komposisi penduduk usia kerja di Lampung pada Agustus 2022 mencapai 6,56 juta jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,52 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 (BPS, 2022b).

Trend di atas tidak serta menunjukkan potensi ancaman di Lampung hanya meliputi masalah pengangguran dan inflasi, namun isu kemiskinan belum dapat terlepas termasuk soal pemerataan pangan. Data BPS nasional menunjukkan Lampung masuk menjadi daerah 15 besar termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan Lampung pada tahun 2023 menyentuh angka 11,44% atau berada pada posisi ke-13 termiskin di Indonesia (BPS, 2023).

Berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan inflasi di Lampung diperburuk oleh karena masalah Covid. Masalah kesehatan dan pandemi yang bersumber dari virus maupun bakteri menjadi sulit diramalkan oleh pemerintah. Penyembuhan dan antivirus juga memerlukan pengujian klinik yang memerlukan waktu, oleh karena itu masalah kesehatan telah menjadi masalah serius yang menambah kerentanan daerah. Isu penyakit dapat melumpuhkan kondisi ekonomi mulai dari kompleksnya kebutuhan medis, isolasi yang berakhir pada kesulitan ekonomi masyarakat dan kelangkaan pangan, dan lainnya. Pemerintah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengatasi pandemic. Selain kesehatan. Aktivitas pertanian yang dipengaruhi dengan musim umumnya melambat pada triwulan IV setiap tahun dan berpotensi memicu kontraksi ekonomi.

## 2. Ancaman Keamanan Lingkungan

Provinsi Lampung memiliki alam dan lingkungan yang dapat menjadi potensi kekayaan. Namun, seperti banyak wilayah di seluruh dunia, Lampung juga dihadapkan pada berbagai ancaman terhadap keamanan lingkungannya. Bagian ini akan membahas beberapa ancaman utama terhadap keamanan lingkungan di Provinsi Lampung.

### a. Deforestasi dan Kerusakan Hutan

Salah satu ancaman besar terhadap keamanan lingkungan di Provinsi Lampung adalah deforestasi yang cepat. Penggundulan hutan untuk pertanian, industri kayu, dan ekspansi perkotaan telah mengurangi luas hutan yang berfungsi sebagai ekosistem penting dan habitat bagi banyak spesies. Upaya perlindungan hutan dan penegakan hukum terhadap pembalakan ilegal sangat penting. Penanaman kembali pohon dan promosi praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu mengatasi deforestasi. Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan alaminya. Namun, sayangnya, deforestasi dan kerusakan hutan telah menjadi isu serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan di wilayah ini.

- **Tingkat Deforestasi yang Meningkat**

Data terbaru menunjukkan bahwa Provinsi Lampung telah mengalami tingkat deforestasi yang meningkat selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahun 2020, hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan 37,42% dari lahan seluas 1.004.735 hektare (ADPIM, 2020). Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap deforestasi ini meliputi perambahan hutan untuk perluasan pertanian, penebangan kayu ilegal, dan ekspansi infrastruktur (Rizkiana, 2022).

- **Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati**

Deforestasi dan kerusakan hutan memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati Provinsi Lampung. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. (Rizkiana, 2022) Kehilangan habitat alami dapat mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies ini, mengakibatkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan.

- **Kualitas Tanah dan Air Terpengaruh**

Hutan-hutan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas tanah dan air. Akar pohon dan vegetasi hutan membantu mencegah erosi tanah dan mangrove dapat mencegah banjir rob (Wicaksono, 2023) dan mempertahankan kualitas tanah yang subur. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai filter alami yang membantu membersihkan air, mengurangi risiko pencemaran dan banjir. (Rizkiana, 2022)

- Perubahan Iklim dan Karbon di Atmosfer

Kerugian hutan juga berdampak pada perubahan iklim global. Hutan-hutan menyimpan sejumlah besar karbon, dan penebangan hutan mengeluarkan karbon tersebut ke atmosfer. Ini dapat menyumbang pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. (Hadi Putra et al., n.d.) Deforestasi yang berkelanjutan dapat mengurangi kemampuan Provinsi Lampung untuk berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai lembaga non-pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan hutan. Inisiatif perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan telah diterapkan untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Tetapi, selain upaya tersebut, edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang. Deforestasi dan kerusakan hutan di Provinsi Lampung adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat deforestasi yang meningkat dapat memiliki dampak merusak pada keanekaragaman hayati, kualitas lingkungan, dan perubahan iklim dalam jangka panjang. Upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam yang berharga ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Provinsi Lampung dapat menghadapi tantangan ini dan melanjutkan perjuangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

b. Krisis Air Bersih

Seperti banyak wilayah di Indonesia, Provinsi Lampung juga menghadapi krisis air bersih. Pencemaran air oleh limbah industri dan domestik telah

mengancam pasokan air bersih dan kualitas air. Investasi dalam infrastruktur pengolahan air dan pengelolaan limbah yang lebih baik diperlukan untuk memastikan pasokan air bersih yang aman. Edukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan praktik pengelolaan limbah yang baik juga penting.

Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang meningkat, dan pencemaran lingkungan yang tak terkendali, pasokan air bersih dan kualitas air menjadi semakin terancam. Data mengenai krisis air bersih di Provinsi Lampung memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan.

- Pasokan Air Bersih yang Terbatas

Pada tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk sekitar 9,3 juta jiwa.(PPID Provinsi Lampung, 2023) Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan air bersih, sementara pasokan air yang terbatas menghadirkan risiko kekurangan pasokan di masa depan. Pada kasus ini, Provinsi Lampung termasuk yang sudah melampaui target jumlah penduduk dengan akses air bersih layak minum. Sebanyak 82,03% sudah memiliki akses, dari target 76,44% (KEMENKEU RI, 2023).

- Pencemaran Air dan Kualitas Air Buruk

Industri, pertanian, dan limbah domestik telah berkontribusi pada pencemaran air di Provinsi Lampung.(Sri, 2022) Pencemaran ini dapat mengurangi kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia. Kualitas air sungai di beberapa daerah di Provinsi Lampung telah melebihi ambang batas yang ditetapkan, pada tingkatan ini, polusi dapat memicu kematian Ikan.(Oktavia, 2020b)

- Dampak Kesehatan Masyarakat

Krisis air bersih memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit lainnya (Puspitasari, 2009). Anak-anak dan kelompok rentan lainnya menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif ini.

Krisis air bersih di Provinsi Lampung adalah masalah yang membutuhkan perhatian segera. Dengan mempertimbangkan data dan fakta yang ada, langkah-langkah proaktif harus diambil untuk menjaga pasokan air bersih yang mencukupi dan kualitas air yang baik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan akses air bersih yang aman dan sehat bagi seluruh penduduk Provinsi Lampung.

c. Konflik Antarmanusia dan Keanekaragaman Hayati

Pertumbuhan populasi dan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan konflik antara manusia dan satwa liar. Pengurangan habitat alami dapat mengancam keanekaragaman hayati unik di Provinsi Lampung. Penetapan kawasan konservasi, perlindungan satwa liar, dan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan lingkungan dan masyarakat dapat membantu mengatasi konflik ini. Provinsi Lampung, dengan keanekaragaman hayati dan lingkungan alaminya yang kaya, menghadapi tantangan kompleks terkait konflik antarmanusia dan perlindungan keanekaragaman hayati. Konflik ini juga memberikan dampak negatif pada lingkungan.

- Konversi Lahan untuk Pertanian dan Perkotaan

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan pertanian dan perkotaan telah menyebabkan konversi lahan alami di Provinsi Lampung. Tanah-tanah yang sebelumnya menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Hal ini dapat mengganggu ekosistem dan mengancam keberlanjutan hayati. (Pasya et al., 2011)

- Konflik dengan Satwa Liar

Pertumbuhan populasi manusia dan ekspansi perkotaan sering kali mengakibatkan konflik dengan satwa liar. Banyak satwa liar, seperti gajah Sumatera, merespon dengan memasuki wilayah manusia untuk mencari makanan atau habitat yang semakin terbatas (Gunawan, 2023). Konflik ini dapat mengancam keselamatan manusia dan kelangsungan hidup satwa liar. Banyak kasus pembunuhan satwa liar di hutan bahkan di pemukiman warga. Fenomena masuknya satwa liar ke pemukiman warga juga merupakan akibat dari habitat yang tidak sesuai lagi.

- Penangkapan Ilegal dan Perdagangan Satwa Liar

Data menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu rute perdagangan satwa liar di Indonesia.(Nasir, 2018) Perburuan dan penangkapan ilegal sering kali mengarah pada penurunan populasi satwa yang dilindungi dan langka. Selain itu, perdagangan ini juga merugikan keanekaragaman hayati secara keseluruhan.

Konflik antarmanusia dan keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung adalah isu yang kompleks dan mendesak. Dengan mempertimbangkan data dan fakta yang ada, langkah-langkah proaktif harus diambil untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Melalui kolaborasi yang kuat dan upaya bersama, Provinsi Lampung dapat mencapai tujuan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat lokal dan harmoni dengan alam.

d. Limbah Plastik dan Pencemaran Laut

Seperti banyak wilayah pesisir, Provinsi Lampung juga menghadapi masalah pencemaran laut akibat limbah plastik. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari pantai dan ekosistem laut. Kampanye kesadaran publik tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah yang lebih baik perlu ditingkatkan. Program daur ulang dan penggunaan alternatif ramah lingkungan juga penting untuk mengatasi masalah ini. Provinsi Lampung kini menghadapi ancaman serius akibat limbah plastik dan pencemaran laut yang semakin meningkat. Data dan fakta tentang limbah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan laut di Provinsi Lampung memberikan gambaran tentang kompleksitas masalah ini dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi pencemaran yang merugikan ini.

- Limbah Plastik yang Meningkat

Data menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi plastik di Provinsi Lampung telah meningkat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Penumpukan sampah terjadi di beberapa titik di Provinsi Lampung, termasuk Kota Bandarlampung, khususnya di Pesisir Teluk.(Azizah, 2023) Penumpukan sampah atau limbah plastik tersebut tidak terlepas

dari budaya pengelolaan sampah plastik yang masih belum baik. Provinsi Lampung menghasilkan sebanyak 1,64 Juta Ton pada tahun 2022.(Oktaria, 2023) Peningkatan penggunaan plastik sekali pakai, seperti kemasan makanan dan minuman, telah menghasilkan peningkatan limbah plastik yang masuk ke lingkungan.

- Dampak Pencemaran Laut

Limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari ekosistem laut di Provinsi Lampung. Plastik dapat terbawa oleh arus laut dan mengendap di pantai, mengganggu lingkungan pesisir dan membahayakan satwa laut. Pada kasus penumpukan sampah di Pesisir Teluk Lampung, yang langsung terdampak adalah nelayan, karena jumlah panen ikan yang menurun akibat pencemaran laut.(Oktavia, 2022) Organisme laut, seperti ikan dan burung laut, sering kali memakan partikel plastik, yang pada akhirnya dapat masuk ke rantai makanan manusia.

- Kerugian Ekonomi dan Sosial

Pencemaran laut oleh limbah plastik memiliki dampak ekonomi dan sosial yang merugikan. Pariwisata pantai, salah satu sumber pendapatan penting di Provinsi Lampung, dapat terpengaruh akibat pantai yang tercemar plastik. Dampak negatif yang terjadi dari fenomena ini tidak hanya terjadi di Lampung, melainkan juga di semua destinasi super prioritas pariwisata Indonesia.(Andriansyah, 2022) Selain itu, nelayan juga dapat mengalami dampak negatif karena kerusakan habitat laut dan penangkapan ikan yang tercemar plastik.(Andriansyah, 2022; Oktavia, 2022)

Limbah plastik dan pencemaran laut di Provinsi Lampung adalah masalah yang memerlukan tindakan segera. Penting untuk memahami dampak serius yang ditimbulkan oleh limbah plastik terhadap lingkungan laut dan masyarakat lokal. Upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, industri, dan organisasi lingkungan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Provinsi Lampung dapat mengurangi dampak pencemaran plastik dan menjaga keindahan dan keberlanjutan lingkungan pesisir yang penting ini.

e. Banjir dan Bencana Alam

Provinsi Lampung rentan terhadap banjir dan bencana alam lainnya seperti tanah longsor dan gempa bumi. Perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana tersebut. Peningkatan dalam perencanaan tata ruang perkotaan, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat tentang penanganan bencana dapat membantu mengurangi dampak bencana alam. Provinsi Lampung, dengan topografi yang beragam dan curah hujan yang tinggi, seringkali menjadi korban banjir dan bencana alam lainnya. Data dan fakta mengenai frekuensi dan dampak bencana di Provinsi Lampung memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam adaptasi dan mitigasi.

- Frekuensi Banjir yang Tinggi

Provinsi Lampung sering mengalami banjir, terutama selama musim hujan. Pada Maret 2023, terjadi bencana banjir di tujuh kabupaten Provinsi Lampung, yaitu Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara dan Way Kanan. (Kupastuntas, 2023) Banjir juga sering terjadi di daerah pesisir dan dataran rendah, mengakibatkan kerugian material dan sosial yang signifikan.

- Kerusakan Infrastruktur dan Ekonomi

Banjir memiliki dampak serius terhadap infrastruktur dan ekonomi Provinsi Lampung. Banjir dapat merusak jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, mengganggu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Kerusakan di beberapa titik jalan lintas Sumatera, Lampung, semakin buruk diakibatkan bencana banjir yang sering terjadi. Kerusakan tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. (Oktavia, 2020a) Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan juga dapat terpengaruh oleh banjir, mengakibatkan kerugian produksi dan pendapatan.

- Ancaman Tanah Longsor dan Gempa Bumi

Selain banjir, Provinsi Lampung juga menghadapi risiko tanah longsor dan gempa bumi. Wilayah dengan topografi berbukit dapat menjadi rentan terhadap tanah longsor, terutama selama periode hujan yang intens. Pada Maret 2023, 17 rumah tertimbun longsor di Lampung Barat. Bencana ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan tanah tidak

berkapasitas menahan debit air.(Antara, 2023) Gempa bumi juga merupakan ancaman nyata yang dapat mengakibatkan kerusakan struktural dan dampak sosial.

Banjir dan bencana alam di Provinsi Lampung adalah kenyataan yang memerlukan tindakan adaptasi dan mitigasi yang serius. Melalui data dan fakta yang ada, penting untuk memahami risiko yang dihadapi oleh wilayah ini dan pentingnya tindakan preventif. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait adalah kunci dalam meminimalkan dampak bencana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan terhadap ancaman alam.

Ancaman terhadap keamanan lingkungan di Provinsi Lampung adalah tantangan serius yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati Provinsi Lampung adalah tanggung jawab bersama untuk generasi sekarang dan masa depan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan upaya bersama, Provinsi Lampung dapat menjaga warisan alamnya yang berharga untuk dinikmati oleh anak cucu kita. Berdasarkan data, pengelolaan lingkungan di Provinsi Lampung masih belum optimal, dikarenakan masih banyak kerusakan dan bencana di berbagai sektor dari fenomena alam yang normal terjadi.

### 3. Ancaman Keamanan Politik: Demografi & Politik Identitas

Dalam mengidentifikasi ancaman dan kerentanan berdimensi politik di Provinsi Lampung, upaya dapat dilakukan dengan menyandarkan analisis pada sejumlah elemen, yang bila mengacu pada pandangan (Buzan, 1983), mencakup antara lain ancaman yang datang, dari proses pembuatan dan penegakan hukum dalam negeri, tindakan politik secara langsung oleh negara terhadap individu/kelompok, perebutan kekuasaan; dan kebijakan keamanan luar negeri.

Sebelum lebih jauh memaparkan ancaman politik di Lampung, penting untuk menyinggung komposisi kependudukan yang ada di Provinsi Lampung. Sebagaimana yang diulas Ananta et al. (2017, lihat hlm. 98-99), karena faktor program transmigrasi, data pada tahun 2010, misalnya, etnis asli Lampung justru tidak menjadi pihak yang mayoritas di tanahnya sendiri. Proporsi terbesar diduduki oleh suku Jawa (hampir 70%), disusul oleh suku Lampung (hampir 14%), Sunda (sekitar 10%), Banten dan Melayu (masing-masing hampir 2,5%);

Palembang, Ogan, Bali (ketiga suku ini hampir 2 per sen), Minangkabau dan Batak (masing-masing hanya sekitar 1 per sen), dan suku-suku lainnya (2 per sen) (Ananta et al., 2017, hlm. 99). Dari data ini tampak jelas bahwa, kendatipun terdapat keberagaman sukubangsa, yang mendominasi komposisi ialah penduduk bersuku Jawa.

Realitas demografis tersebut berpotensi memunculkan ancaman konflik sosial dan politik bila tidak dikelola secara baik. Dalam konteks konflik politik, para penulis berasumsi bahwa kenyataan sosial ini terkait erat dengan persoalan politik identitas dalam hal perebutan kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kerumitan dari segi implikasi pada dinamika politik lokal yang dimunculkan karena faktor transmigrasi menjadi perhatian Warganegara & Waley (2022) yang berargumen bahwa di dalam perebutan kekuasaan di Lampung tidak dapat dipisahkan dari peran dan dominasi etnis Jawa; sehingga, etnis asli Lampung juga berupaya mengadopsi strategi politik dari etnis mayoritas.

Studi yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Junaidi et al. (2021) bahwa dalam upaya meraih posisi politik di wilayah Pringsewu, Lampung, suku Jawa berusaha untuk melakukan integrasi dan penyatuan identitas sehingga dapat diterima dan diakui sebagai pemimpin politik tanpa adanya kekerasan. Seiring dengan hal tersebut, guna mengantisipasi perpecahan, generasi muda di Lampung Selatan, misalnya, menyadari bahwa Pancasila adalah pemersatu keberagaman di Lampung dan mereka harus cekatan dalam memilah pemberitaan politik yang tidak benar (Hertanto et al., 2021).

Dalam dinamika politik lokal, Lampung juga tidak terhindar dari politik uang. Pendekatan keagamaan dipandang sebagai simpul yang kritikal dalam menangani persoalan ini (Khoiriyah & Syarifudin, 2023). Sebagaimana beberapa wilayah menghadapinya, persoalan kesetaraan gender di dalam politik di Lampung. Hal ini, sebagai contoh, dikaji oleh Brown (2018), yang mengungkap bahwa terdapat diskriminasi yang dirasakan oleh kandidat pemimpin politik perempuan, sehingga ia/mereka perlu untuk memperkuat strategi dan memperluas jaringan melalui penggunaan sosial media untuk meyakinkan para calon pemilihnya.

#### 4. Ancaman Keamanan *Societal* (Kemasyarakatan): Ekonomi, Agraria, Kejahatan Lintas-Negara

Fakta demografis sebagaimana telah diutarakan pada ancaman dimensi politik sebelumnya, juga berdampak pada aspek sosial-kemasyarakatan. Konflik yang sudah terjadi dan juga berpotensi untuk kembali terjadi di masa mendatang di Lampung telah dikaji oleh banyak peneliti. Misalnya, konflik Bali Nuraga antara etnis Lampung dan Bali (mempertahankan keberadaan identitas) yang menjadi kian rumit karena kehadiran pihak-pihak lain yang berupaya memperuncing pertikaian (Zulfa, 2014). Juga terjadi kemelut karena pargeseran akses terhadap sumber daya (penghidupan) antara suku Lampung dan Jawa, sementara para elite lokal senantiasa memperkuat kemampuan politik dan ekonominya (Elmhirst, 2001). Guna menyelesaikan konflik, Sasongko et al. (2022) menganjurkan untuk menggunakan jalan kultural yang dimiliki oleh Lampung, yakni melalui prinsip yang terkandung di dalam *piil pesinggiri* lewat musyawarah *rembuk pekon* (Lihat juga kajian oleh Anggraini & Fitriyani, 2022). Pendekatan dengan cara lain, yaitu pemberdayaan melalui kerja sama dan toleransi serta keterbukaan, juga dapat ditempuh untuk mencegah konflik dan mencapai keterpaduan sosial (Tauhidi et al., 2020).

Keberagaman yang ada di Lampung bukan berarti selalu mengarah pada konflik. Fakta relasi yang harmonis antara minoritas Hindu dan mayoritas Muslim dan yang terjadi di Desa Sumber Sari, Lampung Timur, misalnya, dapat dijadikan contoh yang bermanfaat untuk menjaga dan merekat kebersamaan di tengah beragamanya kepercayaan (Saehu & Muchtar, 2023).

Sementara itu, konflik agraria di wilayah Hutan Register 45 Mesuji juga menjadi telaah Wahab et al. (2019) yang berkesimpulan bahwa stigma ilegal yang disandangkan kepada masyarakat penghuni hutan justru digunakan untuk meniadakan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial mereka. Dengan kata lain, cara pandang dari pihak yang memiliki otoritas ini mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak mendasar tersebut (Wahab et al., 2019). Terkait hal itu, Badila & Abdulgani (2022) menyarankan bahwa, untuk mengantisipasi konflik agraria di Lampung, dibutuhkan pemahaman khusus terkait mekanisme dan proses reformasi agraria pada kondisi yang khusus di Lampung. lebih luas lagi, dalam relasi masyarakat dan pemerintah pusat-daerah di Lampung, Satria & Sudagung

(2022) menganjurkan adanya peraturan yang mampu menangani persoalan yang ada di Lampung, khususnya dalam hal otonomi daerah.

### **Kerentanan Keamanan di Provinsi Lampung**

Berbagai ancaman di Provinsi Lampung adalah tantangan serius yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan upaya bersama, Provinsi Lampung dapat memetakan ancaman dan memilih prioritas. Berdasarkan narasi ancaman di atas, maka sudah seharusnya Lampung dapat membaca potensi instabilitas yang disebabkan pertama, jika melihat data ekonomi maka Lampung masih memiliki pekerjaan rumah terkait pengangguran. Pengangguran bisa memicu kriminalitas. Terlebih, transmigrasi yang menyebabkan beragamnya etnis yang bermukim dapat berpeluang memicu kompetisi dan benturan kepentingan etnis, perebutan lahan. Konflik seperti bali Nuraga. Konflik ini bernuansa etnik (dan agama), karena isu yang berkembang membias, antara kelompok etnik Bali dengan kelompok etnik Lampung. Selain itu terjadi juga konflik pada tahun 2004 antara Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan warga di Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Konflik agrarian terkait sengketa Lahan juga terjadi di Mesuji, Lampung. Lampung sebagai pintu masuk ke Sumatera dan berbatasan langsung dengan Jawa dapat menjadi wilayah yang diminati untuk bermigrasi.

Karena Provinsi Lampung hampir separuh wilayahnya memiliki garis pantai, tentu menjadi hal yang krusial untuk mengaitkan kerentanan keamanannya dengan aspek maritim. Sebagai provinsi yang secara geografis menjadi pintu gerbang lalu-lintas yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa (yaitu keberadaan Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan), Lampung pun tidak lepas dari ancaman kejahatan transnasional. Kajian oleh Ahmad Yusup (2022), misalnya, mengungkapkan bahwa terdapat jaringan Indonesia-Thailand untuk kasus narkoba di Lampung melalui jalur laut pada Februari 2022. Baru-baru ini, kepolisian di Lampung menangkap kurir yang membawa 11,8 kg sabu-sabu melewati Pelabuhan Bakauheni Lampung (Sidabutar, 2023). Masih dalam tahun ini, juga didapati kasus tindak pidana perdagangan orang di Lampung

Timur dengan modus menjanjikan untuk dapat bekerja di luar negeri (di Hong Kong dan Jepang), tetapi tanpa melalui prosedur resmi (Antarnews et al., 2023). Tidak hanya sebagai lokasi rekrutmen, Lampung bahkan juga telah menjadi area transit bagi 24 pekerja migran perempuan ilegal asal Nusa Tenggara Barat yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah (OKTAVIA, 2023).

## **KESIMPULAN**

Sebagai sebuah provinsi, Lampung dihadapkan pada begitu banyak ancaman keamanan dan kerentanan. Ancaman dan kerentanan tersebut disebabkan oleh dimensi demografis, geografis, politis, ekonomis, sosial-kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. Dari aspek demografis, keberadaan etnis Lampung yang menjadi kedua terbanyak setelah suku Jawa, menyebabkan interaksi sosial di wilayah ini rentan untuk mengarah pada konflik, termasuk konflik agama mengingat adanya suku Hindu-Bali dan Budha. Selain konflik yang berkaitan dengan kepercayaan, Lampung juga dihadapkan dengan konflik antara komunitas masyarakat dengan entitas swasta yang melakukan aktivitas produksi/pengolahan. Di sisi lain, permasalahan agraria pun menambah rumit masalah yang ada di Lampung.

Dari segi lingkungan hidup, Lampung memiliki hutan yang luas dan juga garis pantai yang panjang yang memungkinkan provinsi ini rentan terhadap bencana alam banjir, longsor, serta akibat lainnya dari perubahan iklim, termasuk sampah/limbah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pelbagai ancaman dan kerentanan di Lampung. Spektrum penegakan hukum yang kuat dan harmonisasi regulasi lintas-sektor pusat-daerah menjadi salah satu kunci yang tidak dapat diabaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

ADPIM. (2020, January 22). Sedikitnya 37,42 % Kawasan Hutan Lampung Rusak, Gubernur Arinal Minta Semua Pihak Kembalikan Fungsi Ekologi dan Ekonomi Hutan - Website Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/sedikitnya-37-42-kawasan-hutan-lampung-rusak-gubernur-arinal-minta-semua-pihak-kembalikan-fungsi-ekologi-dan-ekonomi-hutan>

- Andriansyah, A. (2022, February 3). Sampah Masih Jadi “Momok” Bagi Pengembangan Lima Destinasi Wisata Super Prioritas. <https://www.voaindonesia.com/a/sampah-masih-jadi-momok-bagi-pengembangan-lima-destinasi-wisata-super-prioritas/6465960.html>
- Antara. (2023, March 10). 17 Rumah Tertimbun Longsor di Lampung Barat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230310024454-20-923165/17-rumah-tertimbun-longsor-di-lampung-barat>
- Azizah, N. (2023, January 26). Selama Bertahun-tahun, Sampah Plastik Menumpuk di Pesisir Teluk Lampung Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/rp3li5463/selama-bertahun-tahun-sampah-plastik-menumpuk-di-pesisir-teluk-lampung>
- Ahmad Yusup. (2022). Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) di Daerah Lampung dari Perspektif Transnational Crime. *Lakidende Law Review*, 1(3), 277–286. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.34>
- Ananta, A., Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2017). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Anggraini, R. D., & Fitriasaki, S. (2022). *The Transformation of the Value of Pül Pesenggiri Local Wisdom in Building Harmony Between Natives and Immigrants: Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.067>
- AntaraneWS, Internasional, Khusus, L., Video, Kami, T., Siber, P. M., & Privasi, K. (2023, June 22). *Kemarin Polres Lampung Timur ungkap kasus perdagangan orang*. Antara News Lampung. <https://lampung.antaraneWS.com/berita/688893/kemarin-polres-lampung-timur-ungkap-kasus-perdagangan-orang>
- Badila, I., & Abdulgani, F. (2022). *Agrarian Conflict and the Persistence of Peasant Resistance: Case Study from Lampung, Indonesia: Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.049>
- Brown, N. E. (2018). Hardy-Fanta, Carol, Pei-te Lien, Dianne Pinderhughes, and Christine Marie Sierra. 2016. *Contested Transformations: Race, Gender, and Political Leadership in 21st Century America*, Cambridge University Press, 512 pp., \$39.99 (paperback). ISBN: 9780521144544. *Journal of Women, Politics & Policy*, 39(3), 399–401. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2018.1477366>
- Buzan, B. (1983). *People, states, and fear: The national security problem in international relations*. Wheatsheaf Books.
- Bank Indonesia. (2022, September 7). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Agustus 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Lampung-Agustus-2022.aspx>

- BPS. (2022a). *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/>
- BPS. (2022b). *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1049/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-lampung-agustus-2022.html>
- BPS. (2023). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/>
- Dinastph, P. L. (2023). *Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong penguatan ketahanan pangan guna mendukung pemantapan transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM menuju rakyat Lampung Berjaya—Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung*. <https://www.dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-lampung-arinal-djunaidi-mendorong-penguatan-ketahanan-pangan-guna-mendukung-pemantapan-transformasi-ekonomi-dan-peningkatan-kualitas-sdm-menusju-rakyat-lampung-berjaya>
- Rizkiana, R. (2022, February 8). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Pencegahan (2022). <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/>
- Gunawan, R. (2023, June 24). Kawanan gajah liar masuk pemukiman dan rusak rumah warga Lampung - ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/543039/kawanan-gajah-liar-masuk-pemukiman-dan-rusak-rumah-warga-lampung>
- Hadi Putra, A., Oktari, F., Meidini Putriana, A., & Geografi Universitas Negeri Padang Jl Hamka, M. (n.d.). Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- KEMENKEU RI. (2023, March 28). Strategic Brief Sheet : Reviu Kinerja Program Pengelolaan Sampah, Air Bersih, dan Sanitasi Layak. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/data-publikasi/berita-terbaru/2900-strategic-brief-sheet-reviu-kinerja-program-pengelolaan-sampah,-air-bersih,-dan-sanitasi-layak.html>
- kupastuntas. (2023, March 10). Kupas Tuntas - Tujuh Kabupaten di Lampung Tergenang Banjir, Truk dan 4 Rumah Hanyut. <https://www.kupastuntas.co/2023/03/10/tujuh-kabupaten-di-lampung-tergenang-banjir-truk-dan-4-rumah-hanyut>
- Nasir, H. (2018, December 20). Global Environmental Conservation Organization - WWF Indonesia. <https://www.wwf.id/publikasi/babak-baru-penegakan-hukum-perburuan-dan-perdagangan-satwa-liar-di-lampung>
- Oktaria, A. (2023, January 23). Lampung Hasilkan 1,64 Juta Ton Sampah pada 2022. <https://m.lampost.co/berita-lampung-hasilkan-1-64-juta-ton-sampah-pada-2022.html>
- Oktavia, V. (2020a, January 29). Curah Hujan Tinggi, Jalan Nasional di Lampung Mulai Rusak - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/01/29/curah-hujan-tinggi-jalan-nasional-di-lampung-mulai-rusak>

- Oktavia, V. (2020b, November 17). Pencemaran Sungai Way Sekampung Picu Kematian Ikan - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/17/pencemaran-sungai-way-sekampung-picu-kematian-ikan>
- Oktavia, V. (2022, March 11). Pencemaran Limbah di Teluk Lampung Rugikan Nelayan - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/11/pencemaran-limbah-di-teluk-lampung-rugikan-nelayan>
- Pasya, G., Mudikdjo, K., Tjondronegoro, S. M. P., Kusmana, C., & Nurbaya, S. (2011). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN GAYA KONFLIK LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45B BUKIT RIGIS, PROVINSI LAMPUNG) (Analysis of Causes dan Styles of Environmental Conflict in Protection Forest Zone Management (A Case Study in Register 45B Bukit Rigis Protection Forest Zone, Lampung Province)).
- PPID Provinsi Lampung. (2023, June 8). Jumlah Penduduk Lampung Capai 9,17 Juta Pada 2022 - PPID Provinsi Lampung. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Jumlah-Penduduk-Lampung-Capai-9-17-Juta-Pada-2022>
- Puspitasari, D. E. (2009). DAMPAK PENCEMARAN AIR TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS SUNGAI CODE. 23–34. <http://www.suaramerdeka.com/ha->
- Sri. (2022, April 21). Kupas Tuntas - Air Sungai di Bandar Lampung Banyak yang Tercemar Limbah Domestik. <https://www.kupastuntas.co/2022/04/21/air-sungai-di-bandar-lampung-banyak-yang-tercemar-limbah-domestik>
- Wicaksono, R. A. (2023, April 6). Betahita | Walhi: Hutan Mangrove di Lampung Rusak. <https://betahita.id/news/detail/8632/walhi-hutan-mangrove-di-lampung-rusak.html?v=1680728433>
- Elmhirst, R. (2001). Resource Struggles and the Politics of Place in North Lampung, Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 22(3), 284–306. <https://doi.org/10.1111/1467-9493.00111>
- Hertanto, H., Mulyaningsih, H., & Nurjaman, A. (2021). National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaigns. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 184. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4110>
- Junaidi, J., Suwarno, S., & Romando, F. S. (2021). *Transformation of Transmigration Areas as Ethnic Political Identity (A Study of Javanese Ethnicity in Pringsewu Regency, Lampung Province)*: 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021), Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.019>
- Khoiriyah, F., & Syarifudin, A. (2023). Democracy Challenges in Lampung Province: Young Voter and Religious Approach in Eradication of Vote

- Buying. In R. Perdana, G. E. Putrawan, B. Saputra, & T. Y. Septiawan (Eds.), *Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (Vol. 740, pp. 694–703). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6\\_68](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_68)
- OKTAVIA, V. (2023, June 13). *Polda Lampung Usut Jaringan Penyelundupan Pekerja Migran*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/polda-lampung-usut-jaringan-penyelundupan-pekerja-migran>
- Saehu, R., & Muchtar, I. H. (2023). Religious Pluralism and Harmony among Buddhist–Muslim Communities Living in East Lampung, Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.17>
- Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 103–114. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16n02.2519>
- Satria, I., & Sudagung, A. D. (2022). THE URGENCY OF ESTABLISHING LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REGULATIONS ON GOVERNMENT AFFAIRS. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.55813>
- Sidabutar, R. (2023, August 15). *Polda Lampung Tangkap 3 Kurir Jaringan Narkoba Internasional Asal Malaysia, Sabu 11,8 Kilogram Disita*. Lampung Insider. <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/hukum-kriminal/pr-3437000646/polda-lampung-tangkap-3-kurir-jaringan-narkoba-internasional-asal-malaysia-sabu-118-kilogram-disita>
- Tauhidi, T., Nurdin, F., Budiwiranto, B., & Yanti, F. (2020). Analysis of The Empowerment Policy of The Ethnic Community in Building Social Harmony (Case Study of Lampung Transmigrant). *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia*. Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302626>
- Wahab, O., Mawardi, D., & Rahayu, R. (2019). Agrarian Conflict, Social Exclusion, and Human Rights Violations in Forest Register 45 Mesuji Lampung. *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289427>

- Warganegara, A., & Waley, P. (2022). The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: A case study from Lampung, Indonesia. *Asian Ethnicity*, 23(4), 676–696. <https://doi.org/10.1080/14631369.2021.1889356>
- Zulfa, E. A. (2014). BALI NURAGA-LAMPUNG: IDENTITY CONFLICT BEHIND THE POLICY. *Indonesian Journal of International Law*, 11(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.2.279>